

## DAFTAR PUSTAKA

- Allen, S. &. (2019, April 9). Pengertian dan Konsep Peran . hal. www.freelist.com.
- Berry, David. (2016). *Pokok-Pokok Pikiran daalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gillbbert, S. F. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis Yang Kompetitif Edisi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadiwijoyo, S. S. (2012). *Negara Demokrasi dan Civil Society*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hunthington, S. P. (2011). *Benturan Antar Peradaban*. Yogyakarta: Qalam.
- Mahkamah Konstitusi (2013). *Putusan Nomor 14/PUU-XI*.
- Melianti, Neila. (2018). Peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam Menegakkan Peraturan KPU. *UIN Raden Intan Lampung*.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Morrisan. (2015). *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*. Jakarta: Ramdina Prakarsa.
- Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye.
- Peraturan Komisi Pilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017.

Prihatmoko, J. J. (2003). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerpan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ratna. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis. *Jurnal Wacana Politik ISSN 2502-9185 Vol. 3 Nomor 1 Maret*, 14-28.

Rivai, Vielt. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sholihah, Ratna. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis. *Jurnal Wacana Politik-ISSN 2502-9185- E-ISSN – 2549-2969 Vol. 02 No 1*.

Siagian, S. P. (2012). *Managemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soekanto, Soejono. (2012). *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan RND*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif dan RND*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum .